

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi fokus utama dalam pembangunan nasional, khususnya di wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta. Sebagai ibu kota negara, Jakarta tidak terlepas dari kesenjangan sosial dan ekonomi yang cukup tinggi. Masyarakat miskin dan rentan miskin masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, maupun kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui kebijakan perlindungan sosial menjadi sangat krusial dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan dapat menyebabkan individu atau kelompok masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dan mengelola secara efektif sumber daya yang tersedia di wilayah tempat tinggal mereka, termasuk sumber daya internal dan eksternal.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada September 2022 tercatat sebanyak 494,93 ribu orang atau 4,61 persen dari total penduduk. Angka ini mengalami penurunan pada Maret 2024 menjadi 464,93 ribu orang (4,3 persen), dan kembali menurun pada September 2024 menjadi 449,07 ribu orang atau 4,14 persen. Meskipun terdapat tren penurunan, jumlah penduduk miskin yang masih signifikan menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan perlu terus ditingkatkan.

DKI Jakarta merupakan Ibu Kota Indonesia, di DKI Jakarta kemiskinan masih menjadi permasalahan yang selalu ada dan mengkhawatirkan bagi setiap individu yang berada di dalam masyarakat. Dan semua orang berpotensi menjadi miskin. Kemiskinan menyebabkan berbagai masalah sosial dan menyebabkan penderitaan yang dirasakan oleh jutaan orang, sehingga menuntut disegerakannya solusi dari masalah tersebut.

Gambar 1. 1 Garis Kemiskinan, dan Jumlah Penduduk Miskin di Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta 2022-2024

Kab/Kota	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta					
	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)		Jumlah Penduduk Miskin (ribu)		Persentase Penduduk Miskin	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Kep Seribu	701.088,00	743.820,00	3,67	3,47	14,11	13,13
Jakarta Selatan	842.630,00	891.580,00	81,11	71,90	3,52	3,10
Jakarta Timur	630.842,00	669.713,00	126,63	124,22	4,30	4,20
Jakarta Pusat	733.176,00	784.679,00	44,72	42,78	4,90	4,68
Jakarta Barat	599.514,00	657.247,00	112,18	109,49	4,22	4,09
Jakarta Utara	645.431,00	684.557,00	133,73	125,98	7,24	6,78
DKI Jakarta	738.955,00	792.515,00	502,04	477,83	4,69	4,44

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Menurut gambar tabel diatas, terlihat bahwa persentase pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 4,90%, dan mengalami penurunan menjadi 4,68% pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat di Jakarta Pusat. Namun angka tersebut masih menunjukkan bahwa hampir 5% penduduk di wilayah ini hidup dibawah garis kemiskinan. Hal ini menjadi perhatian serius. Di Jakarta tiadanya hak mereka atas tempat tinggal di ibu kota, mereka menempati lahan lahan ilegal, kolong jembatan, kolong jalan tol, hingga tepi rel kereta. Jumlah kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta di sebabkan oleh beberapa factor, antara lain :

1. Tingginya biaya hidup dan harga property di wilayah tersebut, sehingga sulit bagi penduduk yang memiliki pendapatan rendah untuk memenuhi kebutuhan mereka.
2. Terbatasnya kesempatan kerja, terutama untuk pekerja memiliki keterbatasan pendidikan dan keterampilan.
3. Kurangnya akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau oleh penduduk yang memiliki pendapatan rendah.

Kemiskinan adalah masalah sosial yang terus relevan dan perlu terus dievaluasi. Meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai program untuk mengatasi kemiskinan, hasilnya sering kali belum memuaskan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan merupakan indikator ekonomi yang digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan suatu penduduk di wilayah tertentu, seperti Provinsi, Kota atau Kabupaten di suatu negara. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian sosial mengeluarkan program khusus yaitu program keluarga harapan (PKH) yang dilaksanakan oleh dinas sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial. PKH dijalankan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang kesejahteraan sosial. Pasal 19 “penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Dan juga peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk program keluarga harapan sebagai bantuan sosial bermasyarakat. Program Keluarga Harapan adalah program yang diberikan kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka mengubah perilaku rumah tangga miskin. Program ini merupakan program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Program Keluarga Harapan (PKH) memprioritaskan dua aspek utama, yaitu pendidikan dan kesehatan. Melalui akses pendidikan yang memadai dan berkualitas, diharapkan kualitas sumber daya manusia dapat meningkat. Komponen pendidikan dalam PKH dirancang untuk mendorong peningkatan angka partisipasi dalam program wajib belajar 12 tahun, mulai dari jenjang SD/MI hingga SMP/MTs atau setara. Sementara itu, komponen kesehatan

PKH bertujuan untuk meningkatkan kondisi kesehatan ibu dan anak, khususnya bagi keluarga yang tergolong sangat miskin, dengan memberikan insentif agar mereka rutin melakukan pemeriksaan kesehatan yang bersifat pencegahan (Herliani & Setiawati, 2022).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani permasalahan kemiskinan. Kemiskinan sendiri merupakan permasalahan sosial yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa isu kemiskinan menjadi fokus utama yang perlu mendapat penanganan serius dari berbagai pihak. Meskipun latar belakang dan kondisi setiap negara berbeda, tidak ada satu pun yang sepenuhnya terbebas dari tantangan kemiskinan. Seluruh negara, termasuk Indonesia, mengakui bahwa kemiskinan menjadi hambatan terhadap tercapainya kesejahteraan masyarakat dan harus diatasi secara efektif.

Untuk ditetapkan sebagai penerima program keluarga harapan yaitu melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) rumah tangga harus memenuhi sejumlah kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan DTKS, serta keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Kriteria Fakir Miskin, berikut kriteria umum yang digunakan untuk menetapkan kelayakan penerima bantuan sosial melalui DTKS. Kriteria umum tersebut ialah :

1. Kondisi Ekonomi, rumah tangga tersebut tidak memiliki sumber mata pencaharian tetap, atau memiliki sumber mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, hanya mampu mengakses layanan kesehatan di Puskesmas atau layanan yang subsidi pemerintah.
2. Kondisi Tempat Tinggal, dinding rumah mereka terbuat dari bambu, kayu, atau tembok dengan kondisi tidak baik, luas lantai berukuran kurang dari 8 meter persegi, sumber air minum berasal dari sumur

atau mata air tak terlindungi, air sungai, air hujan, atau sumber lainnya yang tidak layak.

Adapun Syarat Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), sebagai berikut :

1. Rumah tangga miskin atau sangat miskin
2. Keluarga yang memiliki tanggungan anggota rumah tangga yang masuk dalam komponen bantuan sosial (seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas berat)
3. Keluarga yang berkomitmen untuk mengikuti program, seperti pemeriksaan kehamilan dan kesehatan rutin, menyekolahkan anak, dan mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Dari syarat diatas maka pemerintah memperketat dalam membuat kriteria agar dalam distribusinya tepat sasaran. Kriteria yang dimaksud adalah komponen dan kepatuhan terhadap komitmen sosial.

1. Komponen Kesehatan
 - Ibu Hamil atau Menyusui maksimal dua (2) kehamilan
 - Anak usia dini yaitu 0-6 Tahun
2. Komponen Pendidikan
 - Anak SD/ sederajat : usia 6-12 Tahun
 - Anak SMP/ Sederajat : usia 13-15 Tahun
 - Anak SMA/ Sederajat : usia 16-18 Tahun
3. Komponen Kesejahteraan Sosial
 - Lansia yang berusia 70 tahun ke atas
 - Penyandang disabilitas berat (yang membutuhkan permanen)

Tabel 1. 1 Skema Bantuan Bertahap

No	Kategori	Indeks/Tahun Rp.	Indeks/3 Bulan Rp.
1	Ibu Hamil	3.000.000	750.000
2	Anak Usia 0 sd 6 Tahun	3.000.000	750.000
3	Anak Sekolah SD	900.000	225.000
4	Anak sekolah SMP	1.500.000	375.000
5	Anak Sekolah SMA	2.000.000	500.000
6	Disabilitas Berat	2.400.000	600.000
7	Lansia Usia 60 tahun ke atas	2.400.000	600.000

Sumber: Surat Keputusan Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 03/3/BS.02.01/12/2020 tanggal 29 Desember 2020

Seluruh Keluarga di dalam suatu rumah tangga berhak menerima bantuan tunai apabila memenuhi kriteria kepersetaan program dan memenuhi kewajibannya. Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada Ibu atau Perempuan dewasa dan selanjutnya disebut Pengurus keluarga, pengecualian dari ketentuan diatas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada Perempuan dewasa dalam keluarga, maka dapat digantikan oleh kepala keluarga.

Program yang telah dilaksanakan dalam usaha pengentasan kemiskinan ini sudah mampu memberikan perbaikan keadaan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu. Namun, peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang berkepanjangan. Temuan Badan Pengawasan Keuangan (BPK) pada implementasi Program Keluarga Harapan tahun 2023 mencakup 2 hal yaitu :

1. BPK menemukan bahwa terdapat penyaluran dana PKH yang tidak tepat sasaran, dengan Sebagian bantuan diberikan kepada masyarakat yang mampu.
2. Dana bansos yang tidak tersalurkan dengan total mencapai Rp. 227,43 miliar.

Sebagaimana yang penulis temukan pada pelaksanaan program PKH di Kelurahan Kebon Bawang menghadapi beberapa masalah dan tantangan yang dapat menghambat pencapaian tujuannya. Berikut beberapa masalah dalam pencapaian tujuan dari PKH :

1. Penentuan sasaran yang tidak tepat adalah salah satu utama dalam pelaksanaan PKH, terdapat penentuan sasaran ini sering kali terjadi kesalahan karena tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Hal ini dapat mengakibatkan penerima manfaat yang seharusnya dapat memperoleh bantuan PKH tidak dapat menerima bantuan tersebut atau sebaliknya.
2. Angka putus sekolah masih tergolong tinggi di Jakarta.
3. Ketergantungan terhadap bantuan, salah satu tujuan PKH adalah memberikan bantuan sementara kepada keluarga miskin agar mereka dapat mandiri. Namun, terkadang program ini menghadapi tantangan dalam membantu keluarga untuk keluar dari zona nyaman pada bantuan tersebut.
4. Pengelolaan dana yang tidak efektif, manajemen dana PKH yang tidak efektif dapat menyebabkan alokasi yang tidak tepat sasaran, penyaluran yang terhambat atau penyalahgunaan dana oleh pihak tertentu.
5. Kurangnya informasi terhadap warga dari pihak pendamping PKH yang mengakibatkan banyaknya penyaluran dana yang sudah tersalurkan mengendap atau terblokir bahkan KPM dinyatakan sudah tidak layak menerima manfaat.

Tabel 1. 2 Bentuk Permasalahan Pada Program Keluarga Harapan

No.	Bentuk Pemasalahan
1.	Bantuan Tidak Tepat Sasaran
2.	Angka Putus Sekolah Di Jakarta
3.	Ketergantungan Pada Bantuan Sosial
4.	Penyalahgunaan Kartu PKH Oleh Oknum Tertentu
5.	Kurang Informasi Oleh Pihak Pendamping pada warga

Tujuan Utama dari Program Keluarga Harapan ini adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Selain itu terdapat beberapa tujuan lain dari program ini yaitu diharapkan keluarga miskin dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka, seperti makanan, pendidikan, serta layanan kesehatan. Selain itu, program ini juga melibatkan penyuluhan pendidikan guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, serta pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk memperluas akses keluarga miskin terhadap perawatan medis berkualitas.

Dari tujuan utama program tersebut terdapat tantangan terhadap evaluasi program terhadap pelaksanaan PKH. Evaluasi ini menjadi hal yang sangat penting, karena evaluasi tidak hanya bertujuan untuk mengukur hasil atau capaian dari program tetapi juga untuk mengidentifikasi kendala, kelemahan, serta potensi perbaikan dimasa depan. Pemerintah dapat mengetahui sejauh mana program telah dijalankan sesuai dengan tujuan awalnya, serta bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan penerima. Selain itu evaluasi juga membantu menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara dan memastikan bahwa intervensi sosial yang dilakukan tepat guna dan tepat sasaran.

Kelurahan Kebon Bawang di Jakarta Utara menjadi fokus penelitian yang menarik karena beberapa alasan. Kelurahan Kebon Bawang merupakan salah satu wilayah padat penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang bervariasi, serta termasuk dalam area prioritas penyaluran bantuan sosial dari

pemerintah khususnya Program Keluarga Harapan (PKH). Sebagai wilayah padat penduduk di kawasan pesisir Jakarta, Kebon Bawang menghadapi berbagai tantangan sosial seperti keterbatasan akses terhadap layanan publik, pengangguran, dan rendahnya kualitas lingkungan hidup.

Data dari dinas sosial menunjukkan bahwa jumlah penerima manfaat PKH di Kelurahan Kebon Bawang tergolong tinggi dibandingkan kelurahan lain di Jakarta Utara. Selain itu, Kelurahan Kebon Bawang mempresentasikan karakteristik wilayah urban perkotaan yang memiliki tantangan tersendiri dalam implementasi program bantuan sosial seperti dinamika sosial-ekonomi yang kompleks, perbedaan akses informasi, hingga efektivitas pelaksanaan program oleh pendamping PKH lapangan.

Tabel 1. 3 Jumlah Penerima Manfaat Program Kelurahan Kebon Bawang

No.	Wilayah	Jumlah Penerima
1	Rw 001	22 KPM
2	Rw 002	11 KPM
3	Rw 003	45 KPM
4	Rw 004	20 KPM
5	Rw 005	6 KPM
6	Rw 006	60 KPM
7	Rw 007	0 KPM
8	Rw 008	2 KPM
9	Rw 009	12 KPM
10	Rw 010	11 KPM
11	Rw 011	8 KPM
12	Rw 012	40 KPM
13	Rw 013	20 KPM
14	Rw 014	3 KPM
15	Rw 015	7 KPM
16	Rw 016	2 KPM

Sumber Data Petugas Pendamsos Kelurahan Kebon Bawang

Pada data tabel diatas menunjukkan jumlah rumah tangga miskin di kelurahan kebon bawang masih di angka yang cukup tinggi, pendapatan rumah tangga bahkan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, biaya sekolah anak, dan layanan kesehatan. Situasi ini berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga, terutama anak-anak dan lansia yang tinggal di dalam satu rumah tangga. Keluarga penerima manfaat di wilayah ini memperoleh pendapatan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta, yang sekarang berada di kisaran Rp. 4-5 Juta perbulan. Sebagai gambaran banyak warga yang mengaku bahwa gaji Rp 6 Juta sudah termasuk cukup baik, namun bagi mereka yang penghasilannya Rp 5 Juta atau kurang dalam struktur keluarga dengan banyak tanggungan, kondisi tersebut masih tergolong rentan. Pendapatan yang rendah membuat banyak rumah tangga bergantung pada bantuan sosial, termasuk program keluarga harapan (PKH). dari banyaknya rumah tangga yang bergantung pada Program Keluarga Harapan Di kelurahan kebon bawang, ditemukannya permasalahan terkait penyalahgunaan bantuan oleh beberapa oknum penerima manfaat. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang sering ditemui adalah pengguna dana tidak sesuai peruntukannya, dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung kebutuhan pendidikan anak, perbaikan gizi, atau akses layanan kesehatan justru digunakan untuk kebutuhan yang tidak produktif seperti membeli barang elektronik, rokok atau bahkan untuk keperluan hiburan. Fenomena penyalahgunaan ini tentu menjadi hambatan dalam mencapai tujuan utama PKH, yaitu membentuk keluarga mandiri, sehat, dan teredukasi. Selain itu, hal ini menimbulkan kecemburuan sosial ditengah masyarakat karena bantuan yang seharusnya tepat sasaran justru dinikmati oleh pihak yang kurang bertanggung jawab. Akibatnya efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan pun dipertanyakan. Contoh kasus di lapangan selain penyalahgunaan bantuan adalah adanya warga miskin yang belum menerima bantuan PKH, karena tidak terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Atau sebaliknya, warga yang secara ekonomi telah meningkat tetapi

masih tercatat sebagai penerima. Selain itu, kualitas pendampingan terhadap keluarga penerima juga bervariasi, tergantung pada kapasitas dan komitmen pendamping PKH di wilayah tersebut.

Ketidakseimbangan antara tujuan ideal program dengan pelaksanaannya di lapangan ini menciptakan kesejangan kebijakan yang perlu dikaji lebih lanjut. Karakteristik kelurahan kebon bawang sebagai wilayah urban memberikan sudut pandang menarik dalam menilai efektivitas program bantuan sosial di lingkungan perkotaan. Berbeda dengan wilayah perdesaan yang cenderung homogen dan memiliki ikatan sosial kuat, masyarakat urban seperti di kebon bawang menghadapi tantangan yang lebih kompleks, termasuk mobilitas penduduk tinggi, ketimpangan sosial yang mencolok, serta terbatasnya waktu dan partisipasi warga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Penelitian ini penting karena beberapa alasan utama. Pertama, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kedua, seiring dengan peningkatan cakupan dan anggaran pada program PKH dari tahun ke tahun, muncul kebutuhan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaannya di berbagai wilayah. Ketiga, jumlah penerima manfaat PKH yang cukup besar dan mencerminkan dinamika masyarakat urban yang beragam, muncul tantangan dalam pendataan, penyaluran bantuan, dan efektivitas pendampingan yang seringkali menjadi isu yang muncul dalam pelaksanaan program ini di lapangan. Permasalahan dikaji dalam skripsi yang berjudul "*Evaluasi Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Kebon Bawang*", karena dapat membuka ruang analisis terkait keakuratan pendapatan, mekanisme seleksi penerima, serta keterlibatan pihak dinas sosial dan pendamping PKH dalam proses penyaluran bantuannya. Dengan mengevaluasi pelaksanaan program secara mendalam, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Program Keluarga Harapan tepat sasaran dan kontribusi terhadap peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi rumah tangga miskin dan rentan, serta mengidentifikasi kendala dan kesenjangan yang mungkin terjadi di lapangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masyarakat Kelurahan Kebon Bawang Jakarta Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masyarakat Kelurahan Kebon Bawang Jakarta Utara.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa hal yang bermanfaat dari sudut pandang akademis, praktis, dan sosial dengan penelitian ini diantaranya :

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini memiliki kegunaan yang signifikan dalam bidang akademik, khususnya pada ranah ilmu Administrasi Publik dan evaluasi kebijakan sosial. Dengan mengangkat studi kasus Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kebon Bawang, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengayaan teori dan praktik evaluasi kebijakan dalam konteks lokal. Pemanfaatan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product), khususnya pada dimensi proses, memperkuat pendekatan ilmiah dalam menilai pelaksanaan program sosial berbasis masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga memperluas pemahaman tentang bagaimana implementasi kebijakan publik berjalan di lapangan, termasuk tantangan dan dinamika yang terjadi dalam proses pendampingan, pelatihan, dan pemantauan keluarga penerima manfaat (KPM). Ini penting karena banyak studi sebelumnya lebih menyoroti aspek hasil atau dampak (product), sementara kajian tentang proses sering kali diabaikan. Padahal, keberhasilan program sangat bergantung pada kualitas pelaksanaannya. Dari segi metodologi, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini juga memberikan nilai tambah

akademis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman subjektif para aktor di lapangan, seperti pendamping PKH, KPM, dan aparat kelurahan. Hasil temuan ini akan memperkaya pemahaman teoretis maupun empiris tentang pelaksanaan program sosial, sekaligus menjadi pembanding atau pelengkap bagi penelitian kuantitatif yang sudah ada.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi atau literatur tambahan bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain yang ingin mendalami topik evaluasi kebijakan publik, implementasi program sosial, atau pengentasan kemiskinan. Penelitian ini juga dapat dijadikan contoh penerapan model evaluasi CIPP dalam konteks program bantuan bersyarat di tingkat lokal, sehingga memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu dan praktik akademik.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi pelaksana Program Keluarga Harapan di tingkat kelurahan. Temuan dari lapangan mengenai pendampingan, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2), verifikasi komitmen, serta monitoring dan evaluasi, dapat memberikan gambaran nyata tentang kondisi implementasi program. Hal ini memungkinkan pihak kelurahan dan pendamping untuk melakukan refleksi kritis terhadap praktik yang telah berjalan dan memperbaiki aspek-aspek yang masih lemah.

Informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi juga dapat membantu dalam mengidentifikasi hambatan teknis dan non-teknis yang sering dihadapi dalam pelaksanaan PKH. Misalnya, kendala terkait tempat kegiatan, keterbatasan media edukasi, serta ketidaksesuaian data antara pusat dan lapangan. Dengan mengetahui sumber permasalahan secara langsung, maka pihak-pihak terkait dapat merancang solusi yang lebih tepat sasaran dan kontekstual. Lebih jauh, hasil evaluasi ini dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih berbasis data

dalam hal perbaikan sistem pelaporan, digitalisasi data KPM, serta perencanaan kegiatan pendampingan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelaksana program dapat menggunakan informasi ini untuk menyusun SOP yang lebih jelas, memperkuat koordinasi antarinstansi, dan mengembangkan pelatihan bagi pendamping agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen akademik semata, tetapi benar-benar memberikan kontribusi praktis bagi kelancaran dan peningkatan kualitas pelaksanaan PKH. Rekomendasi yang dihasilkan juga dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan program dan peningkatan kapasitas pendamping sosial sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan sosial di tingkat akar rumput

3. Kegunaan Sosial

Dari perspektif sosial, penelitian ini berperan penting dalam mendorong terciptanya program bantuan sosial yang lebih adil, transparan, dan tepat sasaran. Dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pelaksanaan PKH di Kelurahan Kebon Bawang, masyarakat penerima manfaat dapat merasakan manfaat yang lebih nyata karena program yang dijalankan lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Penelitian ini mengangkat suara para penerima bantuan yang selama ini mungkin kurang terdengar dalam pengambilan kebijakan.

Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pelaksana program. Ketika masyarakat melihat adanya evaluasi dan upaya perbaikan yang transparan, maka akan tumbuh rasa partisipasi dan keterlibatan aktif dalam program sosial yang sedang berjalan. Ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan program bantuan dalam jangka panjang dan mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan.

Penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan program sosial. Kesadaran

ini tidak hanya berlaku bagi pelaksana program, tetapi juga bagi penerima manfaat dan masyarakat sekitar, yang dapat turut mengawasi dan memberikan masukan secara konstruktif. Di sisi lain, temuan dari penelitian ini dapat menjadi bahan advokasi bagi organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal dalam memperjuangkan hak-hak kelompok rentan dan miskin. Akhirnya, kegunaan sosial dari penelitian ini terletak pada upayanya untuk mendorong perubahan sosial yang positif. Dengan mengevaluasi pelaksanaan PKH secara kritis dan menyeluruh, penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam proses transformasi sosial di masyarakat, yaitu menuju sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berbasis kebutuhan nyata warga.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini, disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I diawali dengan latar belakang, yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan serta fenomena yang menjadi dasar munculnya permasalahan. Selanjutnya disusun rumusan masalah yang merumuskan pertanyaan utama dan beberapa pertanyaan turunan yang ingin dijawab melalui penelitian. Tujuan penelitian dijelaskan untuk menunjukkan arah dan hasil yang ingin dicapai, sedangkan manfaat penelitian memaparkan kontribusi yang diharapkan baik dari sisi teoritis maupun praktis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab II berisikan tentang beberapa teori sebagai acuan dalam pembahasan yang berhubungan dengan judul penelitian, beberapa teori bersumber pada studi literatur dan studi kepustakaan. Penulis menjelaskan teori-teori utama yang relevan dengan topik yang diteliti, baik teori dari para ahli maupun konsep-konsep yang sudah diakui secara akademis. Teori-teori tersebut dijelaskan secara detail agar dapat menjadi pijakan dalam menganalisis data dan menjawab rumusan masalah.

Selain teori utama, pada bab II juga memuat penelitian terlebih dahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik skripsi. Tujuan bagian ini adalah untuk mengetahui posisi penelitian yang sedang dilakukan dibandingkan dengan penelitian lain, menemukan kesenjangan (gap) penelitian, serta memperkuat argumen bahwa penelitian ini perlu dilakukan. Penulis dapat menganalisis hasil-hasil penelitian sebelumnya untuk menunjukkan persamaan, perbedaan, dan kontribusi yang akan diberikan oleh penelitian ini.

Kemudian terakhir di bab II ini adalah kerangka pemikiran yang merupakan alur logis yang menjelaskan bagaimana teori-teori dan konsep yang sudah dijelaskan akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini mendeskripsikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik penelitian, pengelolaan data dan analisis data. Tujuannya untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana penelitian ini dilakukan dengan didukung oleh metode penelitian ilmiah.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV membagikan hasil riset yang terjadi di lapangan serta mendeskripsikan pada permasalahan yang menjadi titik fokus pada penelitian ini dan menghasilkan temuan untuk dijadikan pembahasan dalam penelitian, bagian ini menyatukan data yang ditemukan dengan teori yang telah dijelaskan pada bab II, sehingga dapat dianalisis secara mendalam. Pada bagian hasil penelitian, penulis menjelaskan temuan-temuan penting yang diperoleh melalui proses pengumpulan data. Temuan ini dapat berupa data kuantitatif seperti tabel, diagram, grafik, maupun data kualitatif seperti kutipan wawancara, deskripsi hasil observasi, atau dokumen pendukung lainnya. Semua data tersebut disusun secara sistematis sesuai dengan fokus atau indikator penelitian, agar pembaca dapat memahami dengan jelas kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kemudian, pada bagian pembahasan, penulis

menganalisis dan menginterpretasikan hasil penelitian dengan menghubungkannya pada teori, konsep, atau hasil penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan sebelumnya di bab II. Pembahasan bertujuan untuk menjelaskan mengapa hasil penelitian tersebut dapat terjadi, apa maknanya, serta bagaimana hasil tersebut menjawab rumusan masalah penelitian. Pada bagian ini, penulis juga dapat membandingkan kesamaan atau perbedaan antara temuan penelitian dengan teori atau penelitian sebelumnya, sehingga dapat menunjukkan kontribusi penelitian yang sedang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V berisikan Kesimpulan dari hasil penelitian, dan membagikan anjuran yang bermanfaat dan saran yang disusun berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh.

